

**PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS* & KOMITE TATA
KELOLA TERHADAP PENGUNGKAPAN *SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS* (SDGS): ANALISIS KOMPARATIF
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR & JASA DI
INDONESIA**

Tesis

Oleh

**Walad Khairamuzad
NPM 2221031016**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS* & KOMITE TATA
KELOLA TERHADAP PENGUNGKAPAN *SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS* (SDGS): ANALISIS KOMPARATIF
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR & JASA DI
INDONESIA**

Oleh

Walad Khairamuzad

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU AKUNTANSI**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

Pengaruh *Financial Distress* & Komite Tata Kelola Terhadap Pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs): Analisis Komparatif Pada Perusahaan Manufaktur & Jasa di Indonesia

Oleh

Walad Khairamuzad

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Tingkat Kesulitan Keuangan (*Financial Distress*) dan Keberadaan Komite Dewan terhadap Pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs), serta melihat perbedaan intensitas pengungkapan tersebut antara sektor industri manufaktur dan jasa. Populasi dalam penelitian ini mencakup perusahaan-perusahaan yang terdaftar di IDX ESG Leaders selama tahun 2021-2024 dengan total sampel akhir sebanyak 120 observasi setelah melalui tahapan seleksi data. Metode analisis yang digunakan meliputi analisis regresi linier berganda dan uji komparatif Independent Sample t-test dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Financial Distress* yang diproksikan melalui Altman Z"-Score memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan SDGs. Hal ini membuktikan *Slack Resources Theory* di mana stabilitas dan kesehatan finansial menjadi prasyarat utama bagi manajemen dalam mengalokasikan sumber daya untuk aktivitas pengungkapan sosial-lingkungan sukarela. Sebaliknya, Keberadaan Komite Dewan ditemukan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pengungkapan SDGs. Kondisi tersebut mengindikasikan fenomena *tokenism* di mana pembentukan komite tata kelola baru sebatas pemenuhan formalitas regulasi bursa (*formalistic compliance*) dan pengawasannya masih berorientasi kaku pada kepentingan pemegang saham (*shareholder-orientation*) dibanding pemangku kepentingan secara luas. Selanjutnya, hasil uji beda mengonfirmasi adanya perbedaan Pengungkapan SDGs yang signifikan antara sektor industri manufaktur dan jasa. Berdasarkan nilai deskriptif rata-rata (*Mean*), sektor jasa mencatatkan indeks pengungkapan yang lebih tinggi (0,6693) daripada sektor manufaktur (0,6144). Melalui lensa *Signaling Theory*, karakteristik sektor jasa yang sangat bergantung pada aset tidak berwujud berupa reputasi mendorong manajemen memberikan sinyal akuntabilitas moral yang lebih kuat lewat kerangka SDGs demi menarik minat konsumen modern dan investor berbasis ESG (*Environmental, Social, and Governance*).

Kata Kunci: *Financial Distress*, Komite Tata Kelola, Pengungkapan SDGs, Sektor Industri.

ABSTRACT

The Effect of Financial Distress and Governance Committee on Sustainable Development Goals (SDGs) Disclosure: A Comparative Analysis of Manufacturing and Service Companies in Indonesia

By

Walad Khairamuzad

This study aims to examine and analyze the effect of financial distress and the presence of a governance committee on Sustainable Development Goals (SDGs) disclosure, as well as to observe the differences in disclosure intensity between the manufacturing and service industry sectors. The population in this study includes companies listed on the IDX ESG Leaders index during the 2021–2024 period, yielding a final sample of 120 observations determined through specific purposive data selection criteria. The analytical methods employed include multiple linear regression analysis and an independent sample t-test, processed using SPSS software. The results demonstrate that financial distress, proxied by the Altman Z"-Score, has a positive and significant effect on SDGs disclosure. This evidence supports the Slack Resources Theory, which posits that financial stability and health serve as primary prerequisites for management to allocate resources toward voluntary socio-environmental disclosure activities. Conversely, the presence of a governance committee is found to have no significant effect on SDGs disclosure. This condition indicates a phenomenon of tokenism, wherein the establishment of a governance committee merely represents formalistic compliance with stock exchange regulations, and its oversight remains rigidly geared toward shareholder orientation rather than broader stakeholder interests. Furthermore, the comparative test confirms a significant difference in SDGs disclosure between the manufacturing and service industry sectors. Based on the descriptive mean values, the service sector records a higher disclosure index (0.6693) compared to the manufacturing sector (0.6144). Viewed through the lens of Signaling Theory, the characteristics of the service sector which heavily relies on intangible assets such as reputation drive management to deliver a stronger signal of moral accountability through the SDGs framework to attract modern consumers and ESG (Environmental, Social, and Governance) investors.

Keywords: *Financial Distress, Governance Committee, SDGs Disclosure, Industry Sector, Slack Resources Theory.*

Judul : **PENGARUH FINANCIAL DISTRESS & KOMITE TATA KELOLA TERHADAP PENGUNGKAPAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS): ANALISIS KOMPARATIF PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR & JASA DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Walad Khairamuzad**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2221031016**

Program Studi : **Magister Ilmu Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

Menyetujui

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si, Ak.

NIP 19750620200122001


Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., Ph.D.

NIP 198010172005122002

2. **Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi**


Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc., Akt., CA.

NIP 197907212003122002

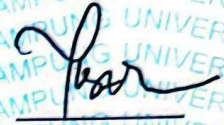
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak.



Sekretaris : Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., Ph.D.



Penguji Utama : Dr. Liza Alvina, S.E., M.Sc., Akt., CA.



Anggota Penguji : Pigo Nauli, S.E., M.Sc., Ph.D.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Nairoh, S.E., M.Si.

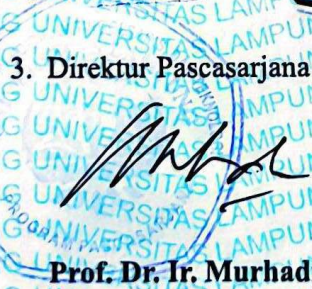
NIP. 19660621 199003 1003

3. Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Murhadli, M.Si.

NIP. 19640326 198902 1001

Tanggal Lulus Ujian : 16 Juni 2026



PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Walad Khairamuzad

NPM : 2221031016

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Pengaruh *Financial Distress* & Komite Tata Kelola Terhadap Pengungkapan *Sustainable Development Goals (SDGs)*: Analisis Komparatif Pada Perusahaan Manufaktur & Jasa di Indonesia” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam tesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya, selain itu atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 17 Juni 2026




Walad Khairamuzad

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Walad Khairamuzad, dilahirkan di Metro pada tanggal 12 Juli 1993. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Bapak Musnar Rozin dan Ibu Margi Utami Susilowati. Penulis mengawali pendidikan di TK PGRI Iringmulyo, Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Metro Timur, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Muhsin, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Lampung Timur dan lulus pada tahun 2011.

Setelah menyelesaikan pendidikan di MAN, penulis melanjutkan pendidikan di Program Studi S1 Akuntansi pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan lulus pada tahun 2018. Di tahun yang sama penulis bekerja sebagai *Quality Assurance* di PT. Dosniroha Indonesia di Jakarta. Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan di Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya penulisan tesis ini. Shalawat teriring salam selalu disanjungagungkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan tesis ini sebagai tanda cinta dan kasih yang tulus kepada:

Diriku sendiri.

Aku yang sudah berjuang selama hampir setahun lamanya menyelesaikan tesis ini dengan berbagai usaha yang dilakukan. Terima kasih sudah selalu berusaha sekuat tenaga dalam segala kondisi dan situasi.

Kedua orang tuaku tercinta,

Ayahanda Musnad Rozin dan Ibunda Margi Utami Susilowati.

Terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang yang tiada tara, yang selalu memberikan doa tiada henti, nasihat yang bermanfaat, kekuatan dalam segala kondisi, dan selalu memberikan dukungan untuk menggapai cita-citaku, Aamiin.

Istriku dan Anakku.

Terima kasih atas semua yang selalu memberikan semangat, do'a dan dukungan tiada henti. Terima kasih atas segala tawa dan momen Bahagia yang kita lalui Bersama.

Almamaterku, Universitas Lampung.

Terima kasih atas bimbingan dan pembelajaran selama ini yang telah diberikan. Semoga selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan oleh Allah SWT. Aamiin.

SANWACANA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pengaruh *Financial Distress* & Komite Tata Kelola Terhadap Pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs): Analisis Komparatif Pada Perusahaan Manufaktur & Jasa di Indonesia”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan tesis ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc., Akt., CA. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak. Dan Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., Ph.D. selaku pembimbing saya yang senantiasa memberikan masukan, kritik yang membangun, dan saran demi kesempurnaan tesis ini. Terima kasih telah memberikan waktu dan bimbingannya yang sangat membantu saya dengan memberikan ilmu hingga saran serta memotivasi saya secara penuh sehingga tesis saya dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc., Akt., CA. dan Bapak Pigo Nauli, S.E., M.Sc., Ph.D. selaku penguji yang selalu menjadi inspirasi bagi saya untuk memperbaiki dan melengkapi penelitian ini dengan baik.
6. Seluruh Staf Pengajar dan Karyawan pada Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan administrasi selama penulis menempuh perkuliahan.
7. Kedua Orang Tua Tercinta Abuyah Musnad Rozin dan Umi Margi Utami Susilowati serta Kakak, Abang & Adikku tercinta yang selalu memberikan

semangat, dukungan, do'a & waktu untuk setiap langkahku menuju kesuksesan dunia & akhirat.

8. Pasangan Hidupku, Istriku Septi Setiyani serta anak-anakku Ayesha Aula Khairanimuzad & Azam Albattar Khairamuzad. Terima kasih selalu kebersamaiku dengan memberikan cinta dan kasih sayang, semangat, dukungan, do'a, waktu dan tenaga. Terima kasih untuk semuanya sehingga aku bisa berada diposisi saat ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, maka penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang dapat membantu penulis dalam menyempurnakan tesis ini. Penulis juga berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya dan penulis juga berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan orang-orang yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.

Bandar Lampung, 17 Juni 2026

Walad Khairamuzad

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
MENGESAHKAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
SANWACANA.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Teori Stakeholders.....	8
2.1.2 Teori Agensi.....	9
2.1.3 Pengungkapan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	10
2.1.4 <i>Financial Distress</i>	13
2.1.5 Komite Tata Kelola	14
2.2 Penelitian Terdahulu	15
2.3 Kerangka Pemikiran.....	18
2.4 Hipotesis Penelitian.....	18
III. METODOLOGI PENELITIAN	22
3.1 Jenis Penelitian.....	22
3.2 Populasi & Sampel.....	22
3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian	22
3.3.1 Pengungkapan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	23
3.3.2 <i>Financial Distress</i>	24

3.3.3 Komite Tata Kelola	25
3.4 Metode Pengumpulan Data	26
3.5 Metode Analisis Data	26
3.5.1 Statistik Deskriptif.....	26
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	26
3.5.2.1 Uji Normalitas	26
3.5.2.2. Uji Multikolinearitas.....	27
3.5.2.3. Uji Heteroskedastisitas	27
3.5.2.4. Uji Autokorelasi	27
3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda.....	28
3.5.4 Uji Hipotesis	28
3.5.4.1 Uji Kelayakan Model (Uji F).....	28
3.5.4.2 Koefisien Determinasi (R ²).....	28
3.5.4.3 Uji Parsial (Uji t)	29
3.5.4.4 Uji Beda (Independent t-test)	29
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Statistik Deskriptif.....	31
4.1.1 Sektor Jasa	31
4.1.2 Sektor Manufaktur	32
4.2 Uji Asumsi Klasik.....	33
4.2.1 Uji Normalitas	33
4.2.2 Uji Multikolinieritas	34
4.2.3 Uji Heteroskedastisitas	34
4.2.4 Uji Autokorelasi.....	36
4.3 Analisis Regresi Linier Berganda	36
4.4 Uji Hipotesis	37
4.4.1 Uji Kelayakan Model F	37
4.4.2 Koefisien Determinasi (R ²)	38
4.4.3 Uji Parsial (Uji t)	38
4.4.4 Uji Beda (Independent t-test).....	39
4.5 Pembahasan	41
4.5.1 Pengaruh <i>Financial Distress</i> Terhadap Pengungkapan SDGs	41
4.5.2 Pengaruh Komite Tata Kelola Terhadap Pengungkapan SDGs	42

4.5.3 Perbedaan Pengungkapan SDGs Antara Sektor Manufaktur dan Jasa	45
V. PENUTUP.....	48
5.1 Kesimpulan.....	48
5.2 Keterbatasan.....	49
5.3 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah perusahaan yang mengeluarkan laporan keberlanjutan.....	3
2.1 <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) PBB	11
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu	15
3.3 Operasional Variabel	23
4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	31
4.2 Uji Normalitas.....	33
4.3 Uji Multikolinieritas.....	34
4.4 Uji Autokorelasi.....	36
4.5 Analisis Regresi Linier Berganda	36
4.6 Uji Kelayakan Model (Uji F).....	37
4.7 Uji Koefisien Determinasi (R ²)	38
4.8 Uji Parsial (Uji t).....	39
4.9 Uji Beda (Independent t-test).....	40
4.10 <i>Group Statistics</i>	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran I.....	18
2.2 Kerangka Pemikiran II.....	18
4.1 Grafik Scatterplot.....	35

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PBB meluncurkan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan pada 2015, menetapkan 17 *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk mengatasi tantangan global seperti kemiskinan, kesenjangan, perubahan iklim dan degradasi lingkungan. SDGs ini mencakup 169 target spesifik yang komprehensif di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan tujuan utama mencegah kemiskinan, melindungi lingkungan, serta memastikan kedamaian dan kesejahteraan bagi semua. Agenda ini menjadi panduan global yang mendorong kolaborasi antara berbagai pihak demi mencapai pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh (UNDP, 2018; *International Accounting Bulletin*, 2023).

Yiu dan Saner (2017) serta Adams (2017) menegaskan bahwa meskipun pemerintah nasional memiliki tanggung jawab utama dalam pencapaian SDGs, peran bisnis dan pemangku kepentingan lainnya tetap penting untuk memastikan keberhasilannya. Perusahaan dapat mendukung pencapaian SDGs dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip SDGs ke dalam operasional bisnis, meningkatkan pemahaman dewan direksi tentang pentingnya SDGs, dan menjadikan agenda SDGs sebagai bagian inti dari strategi serta rantai nilai perusahaan (Ern, 2017). Serupa dengan itu, Schonherr dkk. (2017) dan UNDP (2018) menunjukkan bahwa bisnis dapat memperkuat kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dengan menjadikan SDGs sebagai kerangka kerja utama. Selain itu, perusahaan juga didorong untuk menerapkan praktik tanggung jawab lingkungan (CER) yang mendukung kinerja lingkungan, sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian SDGs terkait lingkungan. Dengan pendekatan ini, bisnis dapat memberikan dampak positif yang lebih besar, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan mata pencaharian, kesehatan, dan pendidikan, sekaligus

mengurangi dampak negatifnya, seperti eksploitasi sumber daya, pencemaran lingkungan, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Pada tahun 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meluncurkan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan yang menetapkan 17 *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk mengatasi berbagai tantangan global, seperti kemiskinan, ketimpangan, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan. SDGs ini mencakup 169 target yang spesifik dan mencakup bidang ekonomi, sosial, serta lingkungan. Tujuan utama dari SDGs adalah mencegah kemiskinan, melindungi lingkungan, dan memastikan kedamaian serta kesejahteraan bagi semua (*United Nations Development Programme – UNDP, 2018; International Accounting Bulletin, 2023*).

Menurut Yiu dan Saner (2017) serta Adams (2017), meskipun pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam pencapaian SDGs, peran sektor bisnis sangat penting untuk memastikan keberhasilan pencapaian tersebut. Perusahaan dapat berkontribusi pada pencapaian SDGs dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam operasional mereka. Selain itu menurut Ern (2017) perusahaan juga perlu untuk meningkatkan pemahaman dewan direksi tentang pentingnya SDGs, serta menjadikan agenda SDGs sebagai bagian dari strategi inti perusahaan.

Salah satu cara bagi perusahaan untuk menunjukkan komitmennya terhadap SDGs adalah dengan meningkatkan pengungkapan mengenai kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility – CSR*) yang mendukung pencapaian tujuan ini. Schonherr dkk. (2017) dan UNDP (2018) menyatakan bahwa bisnis dapat memperkuat program CSR mereka dengan menjadikan SDGs sebagai kerangka kerja utama. Selain itu, perusahaan juga didorong untuk menerapkan *Corporate Environmental Responsibility (CER)* yang mendukung kinerja lingkungan sebagai bagian dari upaya pencapaian SDGs yang terkait dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pendekatan ini, perusahaan dapat memberikan dampak positif yang lebih besar, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, kesehatan, dan pendidikan, serta mengurangi dampak

negatif seperti eksploitasi sumber daya, pencemaran lingkungan, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Perhatian terhadap pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia mengalami peningkatan sejak diberlakukannya berbagai regulasi yang mendorong transparansi informasi keberlanjutan. Pemerintah Indonesia mulai mengadopsi SDGs secara formal melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang kemudian diperbarui dengan Perpres No. 111 Tahun 2022. Regulasi ini menekankan perlunya pelaporan SDGs oleh pemerintah pusat, daerah, hingga sektor swasta. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan POJK No. 51/POJK.03/2017 yang mewajibkan perusahaan publik dan lembaga jasa keuangan untuk menyusun laporan keberlanjutan, termasuk aspek SDGs, mulai 1 Januari 2020 (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Dengan adanya regulasi ini, perusahaan tidak hanya dituntut untuk bertanggung jawab terhadap kinerja keuangan, tetapi juga terhadap dampak sosial dan lingkungannya (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Di Indonesia, sustainability report telah diwajibkan bagi lembaga keuangan dan perusahaan terbuka sejak tahun 2019 dan perusahaan tercatat sejak tahun 2020. Namun, karena adanya COVID-19, penerapannya diundur ke tahun 2021 (PwC Indonesia, 2023). Berdasarkan data yang ada, belum 100% perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menerbitkan laporan keberlanjutan, walaupun tahun ke tahun jumlahnya naik. Berikut data perbandingan jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan.

Tabel 1.1 Jumlah perusahaan yang mengeluarkan laporan keberlanjutan

No.	Tahun	Jumlah Perusahaan	Laporan Keberlanjutan	Persentase
1	2021	766	Data Tidak Tersedia	-
2	2022	824	Sekitar 742	90%
3	2023	943	882	94%

Sumber: idxchannel.com & idx.co.id (2025)

Banyak perusahaan yang telah berupaya mengintegrasikan SDGs dalam strategi bisnis mereka, pengungkapan terkait SDGs sering kali masih belum dilakukan secara transparan dan konsisten, terutama di Indonesia. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2023) dimana pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi penting untuk diteliti karena tingkat pengungkapan di Indonesia masih rendah, median rata-rata pengungkapan hanya sekitar 8 % untuk *business actions* dan 20 % untuk target-target SDGs. Hal ini menciptakan tantangan besar dalam menilai sejauh mana perusahaan benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian tujuan tersebut. Pengungkapan SDGs oleh perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah *financial distress*. Penelitian oleh Gantjowati & Nugraheni (2014) menunjukkan bahwa suatu perusahaan ketika mengalami kondisi baik maka manajemen akan mengungkapkan informasi lebih lengkap dibandingkan ketika perusahaan sedang mengalami *financial distress* yang cenderung akan mengungkapkan informasi secara terbatas. Pada tahun 2023 bursa efek indonesia (BEI) memberikan peringatan tertulis I kepada 3 perusahaan yang belum menyampaikan Laporan Keuangan Interim yang ditelaah secara terbatas oleh Akuntan Publik & memberikan peringatan tertulis II serta denda sebesar Rp50.000.000 kepada 41 perusahaan. (idx.co.id)

Penelitian oleh Myristika & Junarsin (2023) meneliti pengaruh pengungkapan ESG terhadap risiko *financial distress* pada perusahaan yang terdaftar dalam Indeks ESG Sector Leaders IDX Sri Kehati. Hasilnya menunjukkan bahwa pengungkapan kinerja sosial berpengaruh positif signifikan terhadap risiko *financial distress*, sedangkan kinerja tata kelola berpengaruh negatif signifikan. Namun, pengungkapan kinerja lingkungan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko *financial distress*. Sementara itu, studi oleh Farha, Handajani, dan Surasni (2020) menemukan bahwa *financial distress* dan *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability reporting, dengan konservatisme akuntansi sebagai variabel mediasi. Belum banyak penelitian yang secara langsung mengkaji pengaruh *financial distress* terhadap pengungkapan SDGs, khususnya dalam konteks perusahaan di Indonesia. Desi, dkk (2024) dalam penelitian menyebutkan bahwa penelitian yang membahas mengenai *financial distress* yang

dikaitkan dengan pengungkapan SDGs belum terlalu banyak hanya 1%. Selain itu, hasil penelitian yang ada menunjukkan temuan yang beragam, sehingga diperlukan studi lebih lanjut untuk memahami hubungan tersebut secara lebih mendalam.

Selain *financial distress*, komite tata kelola perusahaan juga memainkan peran penting dalam mendorong pengungkapan SDGs. Komite tata kelola berfungsi untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Komite tata kelola yang baik diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk lebih terbuka dan jujur dalam melaporkan upaya keberlanjutan yang telah dilakukan. Sebagaimana yang ditemukan oleh Vaio et al. (2023), pengungkapan SDGs pada perusahaan sangat bergantung pada tata kelola yang efektif, yang mencakup peran penting dari komite yang bertanggung jawab atas keberlanjutan dalam memastikan laporan yang transparan dan akuntabel. Penelitian yang dilakukan oleh Sekarlangit dan Wardhani (2021) menganalisis bagaimana karakteristik dan aktivitas dewan direksi mempengaruhi pengungkapan terkait *Sustainable Development Goals* (SDGs) di perusahaan-perusahaan di Asia Tenggara, penelitian ini menyimpulkan bahwa aktivitas dewan direksi, khususnya tingkat kehadiran dalam rapat dan keberadaan komite CSR, memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan SDGs. Penelitian oleh Muhammad Williams Rahaditama (2022) menunjukkan bahwa dewan direksi dan komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability reporting. Meskipun beberapa penelitian telah mengkaji pengaruh komite tata kelola terhadap pengungkapan sustainability reporting, masih terbatas penelitian yang secara spesifik meneliti pengaruh komite tata kelola terhadap pengungkapan SDGs. Selain itu, peran spesifik dari komite tata kelola dalam mendorong pengungkapan SDGs belum banyak di eksplorasi. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Desi, dkk (2024) dimana penelitian yang membahas mengenai komite tata kelola yang dikaitkan dengan pengungkapan SDGs belum terlalu banyak hanya 6%.

Pemilihan perusahaan manufaktur & jasa pada penelitian ini dilandasi oleh perbedaan karakteristik fundamental antara kedua sektor tersebut. Perusahaan manufaktur umumnya memiliki dampak lingkungan yang lebih tinggi karena

terlibat dalam proses produksi yang menghasilkan limbah, emisi karbon dan penggunaan energi secara intensif. Oleh karena itu tekanan dari masyarakat, pemerintah & investor terhadap transparansi keberlanjutan pada sektor ini relatif lebih besar. Menurut Fitria, dkk (2021) perusahaan manufaktur lebih cenderung mengungkapkan informasi keberlanjutan sebagai bagian strategi legitimasi karena aktivitas operasionalnya langsung berdampak pada lingkungan fisik.

Sementara itu, sektor jasa berperan penting dalam ekonomi modern dan memiliki kontribusi besar terhadap PDB Indonesia, namun eksposurnya terhadap isu lingkungan relatif lebih rendah. Hal ini menyebabkan motivasi pengungkapan SDGs pada sektor jasa lebih banyak didorong oleh faktor sosial dan tata kelola, seperti keberagaman tenaga kerja, perlindungan data konsumen, dan etika bisnis. Penelitian oleh Pratiwi dan Hadi (2020) menunjukkan bahwa perusahaan jasa cenderung fokus pada SDGs pilar sosial dan ekonomi ketimbang lingkungan, sehingga penting untuk menganalisis perbedaan pola pengungkapan dibandingkan sektor manufaktur.

Dari sisi peraturan dan kepatuhan, sektor manufaktur seringkali mendapat pengawasan regulasi yang lebih ketat dibandingkan sektor jasa, terutama terkait lingkungan dan keselamatan kerja. Hal ini memengaruhi sejauh mana perusahaan terdorong untuk mengungkapkan praktik keberlanjutan mereka. Di sisi lain, sektor jasa memiliki tantangan pengungkapan yang berbeda, seperti kurangnya indikator keberlanjutan yang sesuai untuk model bisnis non-produktif. Penelitian oleh Yulianti dan Kartika (2022) menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik ini menyebabkan variasi signifikan dalam kualitas dan intensitas pelaporan keberlanjutan antar sektor, termasuk aspek-aspek SDGs. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Susanto dan Firmansyah (2020) menyarankan bahwa pendekatan sektoral perlu diperhatikan karena bisa memberikan hasil yang lebih kontekstual dan akurat. Dengan pendekatan lintas sektor diharapkan dapat membantu peneliti dan regulator memahami bahwa strategi pelaporan SDGs perlu disesuaikan dengan konteks industri, tidak bisa menggunakan pendekatan satu model untuk semua (*one size fits all*). (Putra & Dewi, 2023)

Berdasarkan latar belakang di atas dan penelitian terdahulu yang terkait, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh *Financial Distress* & Komite Tata Kelola Terhadap Pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs): Analisis Komparatif Pada Perusahaan Manufaktur & Jasa di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Maka rumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs)?
2. Apakah komite tata kelola berpengaruh terhadap pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs)?
3. Apakah ada perbedaan signifikan dalam praktik pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) antara perusahaan manufaktur & jasa di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disusun sebagai berikut:

1. Meneliti pengaruh dari *financial distress* terhadap pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs).
2. Meneliti pengaruh dari *financial distress* terhadap pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs).
3. Meneliti praktik pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada perusahaan manufaktur & jasa di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian disusun sebagai berikut:

1. Manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi untuk pemerintah maupun lembaga terkait di dalam memperbaiki kebijakan mengenai keberlanjutan yang sudah ada saat ini.
2. Manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman betapa pentingnya pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam keberlanjutan usaha.
3. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkuat hasil dari penelitian terdahulu.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Stakeholders

Gray, Kouhy dan Adams (1994) dalam (Ghozali & Chairri, 2007) mengatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin powerful stakeholder, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan stakeholdernya. Oleh karena itu teori stakeholder ini adalah suatu strategi yang dibuat oleh perusahaan untuk menjaga hubungannya dengan pemangku kepentingan atau stakeholder itu sendiri antara lain investor, pemerintah, kreditor, pegawai, pemasok, pelanggan, masyarakat termasuk lingkungan hidup.

Teori Stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain) (Ghozali & Chairri, 2007). Para stakeholder harus menerima laporan dari aktivitas yang dilakukan perusahaan terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, tetapi juga memastikan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pencapaian tujuan keberlanjutan bersama.

Menurut Wulandari (2017), pelaporan ini seharusnya menjadi bentuk dialog antara perusahaan dan stakeholder. Pemangku kepentingan cenderung memiliki pandangan positif terhadap perusahaan yang aktif melaksanakan tanggung jawab sosial, karena menunjukkan bahwa perusahaan selain berfokus pada operasional perusahaan, namun berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan lingkungan. Informasi tersebut mampu menarik perhatian calon investor serta memperkuat hubungan

dengan stakeholder yang sudah ada, karena menunjukkan bahwa perusahaan menghargai dan menerapkan praktik bisnis yang memiliki kontinuitas. Perusahaan yang menyertakan pencapaian SDGs dalam laporannya akan memiliki nilai lebih dalam menarik dan mempertahankan kepercayaan stakeholder. Dengan mengungkapkan SDGs, perusahaan membuktikan komitmennya terhadap keberlanjutan dan memberikan dukungan nyata bagi pemangku kepentingan.

Penelitian lain oleh Rahayu dan Kurniawati (2022) juga menemukan bahwa keterlibatan stakeholder internal seperti karyawan dan manajemen turut memengaruhi pengungkapan SDGs. Ketika budaya organisasi mendukung nilai-nilai keberlanjutan, perusahaan akan lebih terdorong untuk menyampaikan inisiatif SDGs secara transparan. Ini menunjukkan bahwa hubungan teori stakeholder dan pengungkapan SDGs bersifat komprehensif, mencakup aspek internal dan eksternal organisasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dinamika stakeholder menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pelaporan SDGs di perusahaan.

2.1.2 Teori Agensi

Pada Teori Agensi yang dikeluarkan oleh Jensen & Meckling (1976) mengatakan adanya perbedaan kepentingan antara investor dan manajer ketika investor tidak mendapatkan informasi yang diinginkannya terkait dengan kinerja manajer. Karena informasi yang didapatkan investor tidak mencukupi, maka investor tidak pernah mengetahui bagaimana usaha manajer dalam memberikan kontribusi terhadap perusahaan. Pemegang saham akan menginginkan mekanisme pengendalian untuk memonitor kinerja manajer, yaitu dengan cara adanya audit dari pihak eksternal dan pengungkapan yang bersifat sukarela (seperti pengungkapan CSR atau pengungkapan Sustainability report).

Hubungan keagenan ini dapat menimbulkan konflik kepentingan karena dalam praktiknya sering muncul perbedaan tujuan antara pihak internal dan eksternal yang tidak sejalan. Ketidaksesuaian inilah yang pada akhirnya menimbulkan biaya-biaya tidak terantisipasi yang disebut *agency cost*. Menurut Jensen & Meckling (1976) *agency cost* didefinisikan sebagai biaya untuk menyelesaikan atau mengurangi konflik kepentingan. Biaya ini mencakup biaya monitoring,

biaya bonding & biaya residual. Hal ini sejalan dengan penelitian Hapsoro & Suryanto (2020) dimana pengungkapan yang luas dipandang sebagai strategi untuk menurunkan biaya keagenan dengan meningkatkan kepercayaan stakeholder. Mereka menyimpulkan bahwa perusahaan yang ingin memperbaiki citra dan memperkuat hubungan dengan investor cenderung mengadopsi praktik pelaporan SDGs yang komprehensif. Dalam konteks ini, pelaporan informasi yang dapat berperan sebagai pemantau dengan mengurangi ketidakseimbangan informasi dan masalah agensi (Cerbioni & Parbonetti, 2007).

Menurut Fadila & Setiawan (2022), perusahaan dengan struktur tata kelola yang lebih baik cenderung lebih terbuka dalam menyampaikan informasi keberlanjutan. Hal ini mendukung teori agensi bahwa pengawasan yang efektif dapat mendorong manager untuk bertindak lebih akuntabel & selaras dengan kepentingan stakeholder. Secara keseluruhan, penerapan teori agensi terhadap pengungkapan SDGs mencakup segala aspek tata kelola perusahaan yang bertujuan meminimalisir perselisihan kepentingan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta menyelaraskan tujuan antara prinsipal dan agen. Dengan demikian, hal ini dapat menciptakan citra positif bagi perusahaan dan memperoleh kepercayaan dari setiap pemegang saham.

2.1.3 Pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) diresmikan oleh PBB sejak tahun 2015 sebagai seruan universal untuk mengambil langkah konkret dalam mengatasi tantangan secara global seperti kemiskinan, melindungi lingkungan, dan memastikan bahwa pada tahun 2030 tercapai kesinambungan yang menyeluruh dari setiap penjuru dunia. Sasaran dan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang terintegrasi dan komprehensif bersifat menyeluruh sehingga dapat diadaptasikan berbagai negara dengan mempertimbangkan perbedaan kapasitas dan tingkat pembangunan nasional. Dengan dirancangnya *Sustainable Development Goals* (SDGs), diharapkan bisa menjadi pedoman untuk mencapai keberlanjutan secara global. Dalam pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) mencakup 17 tujuan yang meliputi berbagai aspek pembangunan dan keberlanjutan yang menyeluruh, yang nantinya akan digunakan sebagai

pengukuran pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Arumsari & Asrori, 2019):

Tabel 2.1 *Sustainable Development Goals* (SDGs) PBB

No	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) PBB	Penelitian sebelumnya
1	Menghapus semua kemiskinan pada jenis apapun.	(Di Vaio et al., 2022; Elalfy et al., 2021; Heras-Saizarbitoria et al., 2022; Yu et al., 2020; Waleed et al., 2024)
2	Menghapus kelaparan, mewujudkan ketahanan pangan, dan meningkatkan kualitas gizi.	
3	Terjaminnya kehidupan yang baik serta sehat dan mendorong kesejahteraan di berbagai usia	
4	Penyediaan akses pendidikan dengan merata, berkualitas, serta mendorong peluang belajar untuk seluruh lapisan masyarakat.	
5	Mewujudkan adanya kesederajatan gender pada segala aspek dan mendorong pemberdayaan perempuan.	
6	Memastikan adanya air bersih dan penanganan sanitasi yang memadai.	
7	Mengupayakan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan dan secara terus menerus.	
8	Meningkatkan daya apung ekonomi secara terus menerus dan inklusif sekaligus menciptakan lapangan kerja yang adil dan merata.	
9	Mewujudkan pembangunan infrastruktur, mendukung industrialisasi yang inklusif, dan mendorong inovasi dengan memastikan akses terhadap teknologi.	
10	Mengurangi ketidakseimbangan sosial baik di dalam maupun antar negara dengan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi, dan	

	politik bagi semua orang tanpa membedakan suku, ras, atau agama.	
11	Mewujudkan kota dan pemukiman yang layak huni, aman, serta berkelanjutan.	
12	Menjamin pola konsumsi dan produksi yang mendukung keberlanjutan.	
13	Mewujudkan tindakan pencegahan untuk mengurangi dampak terhadap perubahan iklim.	
14	Menjaga ekosistem bawah laut secara berkelanjutan.	
15	Menjaga ekosistem daratan yang berkelanjutan.	
16	Mendorong masyarakat dalam menciptakan perdamaian, memberikan akses terhadap keadilan kepada setiap orang dan membangun kelembagaan yang efektif.	
17	Mempertanggung kemitraan yang universal bagi pembangunan berkelanjutan.	

Persiapan regulasi terhadap penerapan keberlanjutan ini telah diterbitkan dalam Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Keberlanjutan. Melalui regulasi ini, Presiden telah menetapkan target nasional untuk SDGs. SDGs dalam Pasal 2 Peraturan Presiden 111/2022 bertujuan untuk peningkatan keseimbangan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang, dengan memastikan bahwa kehidupan sosial dalam seluruh masyarakat dapat terus berlangsung dengan baik. Selain itu, upaya menjaga kualitas lingkungan hidup menjadi prioritas, seiring dengan dorongan untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan merata. Tidak kalah penting, tata kelola yang baik juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup lintas generasi secara berkesinambungan.

Di era globalisasi, perusahaan-perusahaan multinasional dan transnasional seringkali memiliki pendapatan yang dapat diukur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) seiring dengan itu, mereka tidak hanya berdampak pada masyarakat di wilayah operasinya tetapi juga memberikan dampak yang besar pada seluruh ekosistem bumi (Wood et al., 2017). Sehingga, perusahaan-perusahaan perlu

mengupayakan aktivitas operasionalnya dengan efektif dan efisien. Efektivitas berarti menetapkan dan mencapai tujuan yang tepat, sedangkan efisiensi tercapai dengan mencapai tujuan dengan menggunakan kumpulan sumber daya yang optimal. Mengingat bahwa SDGs mencerminkan pendekatan sistemik dan melalui penetapan tujuan, para pemangku kepentingan maupun entitas bisnis dapat berkontribusi pada efektivitas, keduanya dapat digunakan untuk menjembatani kesenjangan antara tingkat perusahaan dan global serta dapat mendukung penggunaan sumber daya perusahaan yang efisien. Jika perusahaan secara terbuka dan transparan mengungkapkan keterlibatan mereka dalam agenda SDGs, hal ini tentu akan menyalurkan perubahan positif dalam praktik bisnis, tanggung jawab lingkungan dan sosial, serta dapat mendorong perkembangan ekonomi di masa depan (Arumsari & Asrori, 2019).

2.1.4 *Financial Distress*

Menurut Platt & Platt (2002) *financial distress* terjadi ketika arus kas perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban operasional maupun keuangan dalam jangka pendek maupun panjang. Dalam konteks ini, kondisi distress bukan hanya dilihat dari kegagalan membayar utang, tetapi juga mencakup gejala awal seperti penurunan profitabilitas, efisiensi operasional yang memburuk, dan rasio keuangan yang melemah. Fenomena ini menjadi perhatian penting dalam analisis kinerja dan kelangsungan hidup perusahaan, terutama pada sektor-sektor yang sangat kompetitif.

Lestari, dkk (2021) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Analisis laporan keuangan melalui rasio merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menilai kondisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu. Oleh karena itu, analisis rasio keuangan juga dapat dimanfaatkan untuk memprediksi potensi terjadinya *financial distress*. Menurut Kristanti (2019), terdapat dua pendekatan utama dalam memprediksi *financial distress*, yaitu model klasik dan model alternatif, yang selanjutnya dikembangkan menjadi enam metode analisis, yakni *Univariate Analysis, Multivariate Analysis, Conditional Probability Model, Decision Tree, Artificial Neural Network, dan Survival Analysis*.

Sementara itu, dalam jurnal yang ditulis oleh Edi dan Tania (2018), disebutkan bahwa berbagai model dan alat ukur untuk menilai *financial distress* telah

dikembangkan oleh peneliti sebelumnya guna mengidentifikasi tingkat kinerja keuangan perusahaan. Beberapa tokoh yang berkontribusi besar dalam pengembangan model ini antara lain Fuzzy (1965), Beaver (1966), Altman (1968, 1984, 1995), Springate (1978), Zmijewski (1983), dan Grover (1968).

Beragamnya model yang telah dikembangkan menunjukkan bahwa prediksi terhadap kondisi *financial distress* merupakan hal yang krusial bagi perusahaan dalam menilai stabilitas dan keberlangsungan keuangannya.

2.1.5 Komite Tata Kelola

Penerapan GCG menekankan fungsi efektif dari organ perusahaan seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, serta organ pendukungnya yang mencakup berbagai komite tata kelola seperti Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, hingga Komite Keberlanjutan (Bursa Efek Indonesia). Komite-komite ini bertugas mengawasi manajemen, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan memandu kebijakan perusahaan agar selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Dengan demikian, keberadaan dan efektivitas komite menjadi indikator utama dalam menilai kualitas tata kelola perusahaan.

Penelitian oleh Setyawan, dkk (2022) mengidentifikasi bahwa dari construct tata kelola perusahaan, hanya pejabat keberlanjutan (*Sustainability Officer*) yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan *sustainable development goals* (SDGs) dalam *sustainability report* perusahaan. Temuan ini menitikberatkan pentingnya institusi khusus di dalam struktur GCG seperti *Sustainability Committee* yang menjadi penggerak utama dalam memastikan bahwa laporan perusahaan tidak hanya memenuhi standar GRI, tetapi juga secara eksplisit mencerminkan kontribusi terhadap agenda *sustainable development goals* (SDGs).

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Fahad & Rahman (2020) yang menegaskan bahwa variabel tata kelola termasuk keberadaan *sustainability committee*, independensi dewan komisaris, dan ukuran komite audit mempunyai korelasi positif dengan tingkat pengungkapan CSR.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini disusun dengan meninjau penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan judul penelitian, terdiri dari :

Tabel 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil
Waleed M. Al-ahdal et al., 2024	<i>Unveiling the Impact of Firm-Characteristics on SDGs Disclosure</i>	Hasil temuan penelitian ini adalah <i>firm size</i> dan <i>board independence</i> berpengaruh positif signifikan, <i>ownership concentration</i> memiliki pengaruh negatif signifikan sedangkan <i>leverage</i> , <i>profitability</i> , dan <i>board size</i> tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan SDGs.
Diego Andres Correa-Mejia et al., 2024	<i>The critical role of corporate governance in sustainable development goals prioritisation: A 5 P s-based analysis for emerging economies</i>	Hasil temuan penelitian ini adalah <i>corporate governance</i> memiliki dampak signifikan dan positif terhadap pencapaian SDGs, pengaruh <i>corporate governance</i> paling kuat dalam tujuan-tujuan yang berkaitan dengan keadilan, institusi, dan ekonomi, temuan ini konsisten di berbagai pengujian model dan sub-sampel negara berkembang vs negara maju.
Nyoman Radhika Saraswati Devi dan Ni Made Dwi Ratnadi, 2024	Ukuran Perusahaan, Tipe Industri, dan Kualitas Pengungkapan <i>Sustainable Development Goals</i>	Hasil penelitian ini adalah ukuran perusahaan berpengaruh positif & signifikan terhadap kualitas pengungkapan SDGs, tipe industri & profitabilitas (<i>ROA</i>) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan SDGs,
Luh Gede Krisna Dewi et al., 2022	<i>Corporate Governance Toward Sustainability Disclosure: Recent</i>	Penelitian ini menggunakan pendekatan <i>systematic literature review</i> , hasil

	<i>Development and Future Research Agenda</i>	penelitian menunjukkan bahwa keberadaan direktur perempuan (<i>female directors</i>) dan direktur independen (<i>independent directors</i>) menjadi variabel yang paling sering dikaitkan secara positif dengan pengungkapan keberlanjutan, beberapa penelitian menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara keberadaan direktur perempuan dan pengungkapan keberlanjutan tetapi ada pula studi yang menemukan tidak ada hubungan signifikan, tergantung pada konteks budaya dan struktur organisasi.
Arumsari, Y., & Asrori, 2019	<i>The Analysis of Sustainability Report Disclosure in the Companies listed on the IDX Year 2014-2016</i>	Hasil penelitian ini adalah ukuran perusahaan & profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan SDGs, kepemilikan institusional berpengaruh positif tidak signifikan sedangkan leverage & umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan SDGs.
Desi Fitri Yani et al., 2024	Laporan Keberlanjutan di Indonesia dan Pengungkapannya di Lingkungan Perusahaan: <i>A Systematic Literature Review</i>	Penelitian ini menggunakan pendekatan <i>systematic literature review</i> , hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan di Indonesia yang mengungkapkan laporan keberlanjutan, terutama pasca adopsi GRI Standards dan regulasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Beberapa faktor seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, dan GCG terbukti berpengaruh positif terhadap tingkat

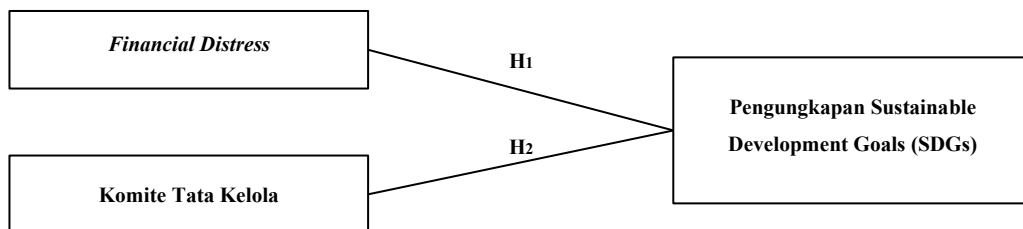
		<p>pengungkapan, perusahaan besar dan yang lebih menguntungkan lebih proaktif melaporkan keberlanjutan. Industri dengan dampak lingkungan yang besar (seperti pertambangan dan energi) lebih banyak mengungkapkan informasi keberlanjutan dibanding industri lain. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya literasi keberlanjutan serta belum optimalnya penegakan regulasi di Indonesia.</p>
Asih Pratiwi & Mayar Afriyenti, 2023	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Financial Distress terhadap Pengungkapan Sukarela	<p>Hasil dari penelitian ini adalah kepemilikan manajerial & komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela, sedangkan <i>financial distress</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan sukarela.</p>
Atahau, A. D. R., & Kausar, M. F., (2022)	<i>Sustainability Report Terhadap Nilai Perusahaan: Studi Perusahaan yang Terdaftar dalam Sustainability Report Rating</i>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah pengungkapan aspek ekonomi & pengungkapan aspek lingkungan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan pengungkapan aspek sosial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.</p>
Rahayu, R., & Djuminah, D., 2022	<i>Does the Board of Commissioners' Characteristics Relevant to the Sustainable Finance Disclosure in Indonesian Banks?</i>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris & frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan keuangan keberlanjutan. Sedangkan independensi dewan komisaris tidak memiliki</p>

		pengaruh signifikan terhadap pengungkapan keuangan berkelanjutan.
--	--	---

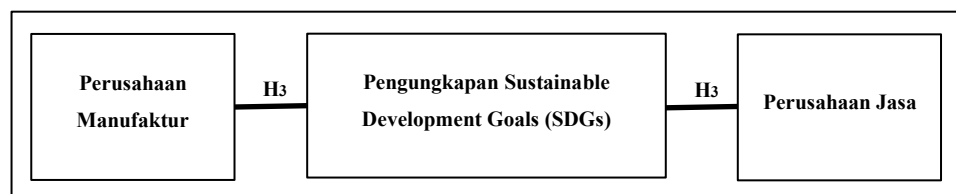
2.3 Kerangka Pemikiran

Dari Penjelasan di atas, kerangka pemikiran dapat dibentuk dengan:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran I



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran II



2.4 Hipotesis Penelitian

Financial distress merupakan kondisi di mana perusahaan mengalami tekanan keuangan yang signifikan, seperti kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang, yang dapat mengarah pada potensi kebangkrutan. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan cenderung mengurangi aktivitas yang tidak bersifat wajib, termasuk pengungkapan informasi terkait keberlanjutan seperti *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Pengungkapan SDGs, yang memerlukan investasi waktu, tenaga, dan sumber daya, mungkin dipandang sebagai beban tambahan oleh perusahaan yang sedang menghadapi keterbatasan finansial. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat distress tinggi cenderung memiliki insentif lebih rendah untuk secara sukarela mengungkapkan informasi keberlanjutan. (Harymawan et al., 2021).

Beberapa penelitian sebelumnya mendukung hubungan negatif ini. Misalnya, penelitian oleh Veronica dan Bachtiar (2018) menunjukkan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela karena perusahaan lebih fokus pada kelangsungan hidup daripada transparansi eksternal. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Fitriany et al. (2020), yang menyatakan bahwa perusahaan dalam tekanan keuangan cenderung menghindari pengungkapan isu-isu sosial dan lingkungan karena dianggap tidak berdampak langsung terhadap perbaikan kinerja jangka pendek, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2023).

Secara teoritis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori agensi dan teori stakeholder. Berdasarkan teori agensi, dalam situasi *financial distress*, konflik kepentingan antara manajemen (agen) dan pemilik (prinsipal) dapat meningkat, dimana manajemen cenderung memprioritaskan kelangsungan operasional dan pelunasan kewajiban finansial jangka pendek, sehingga mengurangi perhatian pada transparansi keberlanjutan yang tidak langsung berdampak pada kinerja keuangan jangka pendek. Di sisi lain, teori stakeholder menekankan pentingnya perusahaan memenuhi kebutuhan dan harapan berbagai stakeholder, termasuk masyarakat dan lingkungan. Namun, dalam kondisi tekanan keuangan, perusahaan mungkin mengabaikan pengungkapan terkait SDGs karena fokus utama bergeser pada pemenuhan kewajiban finansial, sehingga mengurangi transparansi terhadap stakeholder yang lebih luas. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis disusun sebagai berikut:

H₁: *Financial distress* berpengaruh terhadap pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Komite tata kelola (*governance committee*) adalah salah satu komite yang dibentuk dalam struktur organisasi perusahaan untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk aspek transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial. Komite ini berfungsi untuk mengawasi kebijakan dan praktik manajemen serta memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku dan standar etika (Bursa Efek Indonesia). Dalam konteks keberlanjutan, Dewi dkk. (2022) menyatakan bahwa komite tata kelola

memiliki peran penting dalam mendorong pengungkapan informasi yang berhubungan dengan keberlanjutan perusahaan, termasuk pengungkapan terkait Sustainable Development Goals (SDGs).

Penelitian oleh Al-Dmour et al. (2019) menunjukkan bahwa komite tata kelola yang efektif dapat meningkatkan transparansi dalam pengungkapan informasi keberlanjutan karena komite ini berperan dalam memastikan bahwa isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola dimasukkan dalam laporan tahunan perusahaan. Hal ini diperkuat oleh studi Khan et al. (2020), yang menemukan bahwa komite tata kelola yang aktif dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait keberlanjutan lebih cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang lebih komprehensif mengenai SDGs. Dalam perspektif teori agensi, keberadaan komite tata kelola dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik dengan meningkatkan pengawasan terhadap keputusan manajerial, termasuk dalam hal pengungkapan keberlanjutan. Sementara itu, menurut teori stakeholder, komite ini juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa perusahaan memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder, termasuk masyarakat dan lingkungan, melalui keterbukaan informasi yang relevan dan bernilai. Dengan demikian, keberadaan dan efektivitas komite tata kelola diharapkan dapat mendorong pengungkapan SDGs secara lebih luas dan berkualitas. Dengan demikian, hipotesis yang disusun adalah:

H₂: Komite tata kelola berpengaruh terhadap pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Perbedaan karakteristik antara sektor manufaktur dan jasa dapat memengaruhi tingkat dan pola pengungkapan keberlanjutan, termasuk pengungkapan Sustainable Development Goals (SDGs). Sektor manufaktur yang biasanya memiliki dampak lingkungan langsung dan lebih padat modal cenderung memiliki tekanan eksternal yang lebih kuat untuk mengungkapkan komitmen keberlanjutan secara lebih jelas. Permata Sari dan Andreas (2019), dalam penelitiannya menemukan bahwa pengungkapan keberlanjutan pada perusahaan sektor manufaktur dan jasa memiliki pengaruh yang berbeda terhadap kinerja keuangan, yang mengindikasikan adanya perbedaan dalam fokus dan intensitas

pengungkapan keberlanjutan antara kedua sektor tersebut. Di sisi lain, penelitian oleh Sugma, Ediraras, dan Nurjihan (2024) menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, rasio keuangan, dan komite audit secara simultan memengaruhi pengungkapan keberlanjutan pada perusahaan manufaktur. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengaruh faktor-faktor internal terhadap pengungkapan keberlanjutan dapat berbeda antar sektor, khususnya antara sektor manufaktur dan jasa. Dengan demikian hipotesis yang disusun adalah:

H₃: Terdapat perbedaan pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) antara sektor manufaktur dan jasa.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif dan komparatif. Pendekatan asosiatif digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel financial distress dan komite tata kelola terhadap pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sementara itu, pendekatan komparatif dilakukan untuk melihat perbedaan pengaruh antar sektor, yaitu sektor manufaktur dan jasa yang terdaftar di BEI selama periode 2021–2024.

3.2 Populasi & Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor manufaktur dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2021–2024. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan komponen indeks IDX ESG Leaders yang terdaftar sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun pada periode amatan (2021–2024), baik secara berturut-turut maupun tidak.
2. Perusahaan menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) dan/atau laporan keberlanjutan (*sustainability report*) selama periode penelitian.
3. Laporan keuangan maupun laporan keberlanjutan perusahaan menyajikan data dan informasi yang lengkap terkait seluruh variabel yang dibutuhkan dalam penelitian.

Jumlah sampel akan dibedakan berdasarkan sektor untuk memungkinkan analisis komparatif.

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua variabel independen dan satu variabel dependen, serta dua variabel kontrol. Definisi Operasional dari variabel penelitian ini adalah:

3.3.1 Pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sari dan Nugroho (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa tingkat pengungkapan bervariasi berdasarkan karakteristik tata kelola dan kondisi keuangan perusahaan. Dengan demikian pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) diukur sebagai berikut: menggunakan metode *content analysis* pada laporan keberlanjutan atau laporan tahunan perusahaan, di mana setiap item pengungkapan yang relevan dengan 17 tujuan SDGs diberi skor biner (1 = terungkap, 0 = tidak terungkap). Total skor pengungkapan dihitung sebagai jumlah dari seluruh indikator yang diungkapkan oleh perusahaan, kemudian dinormalisasi menjadi persentase terhadap total item yang mungkin diungkapkan.

Tabel 3.3 Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Financial Distress (X1)	Tingkat kesulitan keuangan perusahaan	Altman Z"-Score	Rasio
Komite Tata Kelola (X2)	Keberadaan komite yang mengawasi penerapan GCG	Jumlah komite tata kelola yang ada/ Total komite tata kelola (4 komite tata kelola)	Rasio
Pengungkapan SDGs (Y)	Tingkat pengungkapan informasi SDGs	Pengungkapan SDGs (berdasarkan 17 tujuan SDGs)	Rasio

Peneliti menerapkan metode analisis isi (*Content Analysis*) pada Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) perusahaan sampel dengan melalui 3 tahapan prosedur yang sistematis dan objektif sebagai berikut:

1. Tahap Skrining Manual Awal (*Manual Preliminary Screening*), peneliti melakukan pembacaan dokumen Laporan Keberlanjutan secara manual (*scanning*) pada bagian sekilas laporan, sambutan Direksi/Komisaris, dan bab mengenai Strategi Keberlanjutan perusahaan. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi komitmen awal korporasi serta melihat apakah perusahaan

telah menyediakan bab atau tabel khusus terkait visualisasi 17 logo/poin SDGs PBB di dalam laporan mereka.

2. Tahap Pencarian Berbasis Kata Kunci (*Keyword-Based Search / Text Mining*), untuk mengantisipasi adanya pengungkapan yang tidak menggunakan simbol visual standar PBB, peneliti melakukan pelacakan teks secara digital menggunakan fitur pencarian kata kunci (*shortcut CTRL+F*) dengan kata kunci spesifik dan padanannya yang baku di Indonesia, yaitu:
 - a. "SDGs" atau "*Sustainable Development Goals*"
 - b. "TPB" atau "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan"
 - c. "Keberlanjutan"
3. Tahap Verifikasi dan Kodifikasi Matriks Materialitas (*Materiality Matrix Verification*), setelah paragraf atau tabel yang memuat kata kunci tersebut ditemukan, peneliti melakukan analisis mendalam untuk memverifikasi keselarasan tindakan perusahaan dengan indikator spesifik dari masing-masing 17 tujuan SDGs. Peneliti memeriksa bagian Tabel Pemetaan SDGs atau Matriks Materialitas yang biasanya telah disediakan oleh emiten untuk menegaskan poin target mana saja yang berhasil dilaporkan. Selanjutnya, dilakukan kodifikasi (skoring) biner: nilai 1 jika perusahaan terbukti mengungkapkan kontribusi pada poin SDG tersebut, dan nilai blank jika tidak mengungkapkan.

3.3.2 *Financial Distress*

Lestari, dkk (2021) mengungkapkan pada penelitiannya bahwa hasil penelitian Türk dan Kurklu (2017) yang berjudul *Financial Failure Estimate In Bist Companies With Altman (Z-Score) And Springate (S-Score) Models*, menunjukkan bahwa model Altman menunjukkan tingkat akurasi sebesar 69%, sedangkan model springate hanya memberikan tingkat akurasi sebesar 57%. Dan Model Altman berkembang seiring waktu dengan memperluas cakupan model agar dapat memprediksi semua jenis perusahaan, baik yang sudah *go public* atau privat, maupun perusahaan selain manufaktur. Sehingga perhitungan financial distress dilakukan sebagai berikut:

$$Z'' = 6,56X_1 + 3,26X_2 + 6,72X_3 + 1,05X_4$$

Keterangan:

Information:

$Z'' = \text{Overall Index}$

$X_1 = \text{Working Capital} / \text{Total Asset}$

$X_2 = \text{Retained Earnings} / \text{Total Asset}$

$X_3 = \text{Earning Before Interest and Taxes} / \text{Total Asset}$

$X_4 = \text{Book Value of Equity} / \text{Book Value of Total Debt}$

Model ini mengkategorikan kondisi perusahaan sebagai berikut:

- a. Jika Z-Score $Z < 1,1$ maka perusahaan dalam kondisi tertekan.
- b. Jika Z-Score berada di antara $1,1 < Z < 2,6$ maka perusahaan berada dalam area abu-abu.
- c. Jika Z-Score $Z > 2,6$ maka perusahaan tidak dalam kondisi tertekan (sehat).

3.3.3 Komite Tata Kelola

Komite tata kelola bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), terdapat 4 komite utama yang berfungsi menegakkan tata kelola baik (Good Corporate Governance) di bawah Dewan Komisaris: Komite Audit (Wajib berdasarkan POJK No. 55/POJK.04/2015), Komite Nominasi (Wajib berdasarkan POJK No. 34/POJK.04/2014), Komite Remunerasi (Wajib berdasarkan POJK No. 34/POJK.04/2014, catatan: nominasi & remunerasi boleh digabung), Komite Pemantau Risiko (Wajib untuk sektor tertentu seperti Perbankan berdasarkan POJK No. 18/POJK.03/2016, atau Komite ESG/Keberlanjutan pada perusahaan tertentu).

Dalam penelitian oleh Meiriany, dkk (2020) ditemukan bahwa keberadaan dan efektivitas komite tata kelola berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan keberlanjutan perusahaan. Komite tata kelola diukur menggunakan indeks komite tata kelola (*Governance Committee Index*) sebagai berikut:

$$\text{Keberadaan Komite Tata kelola} = \frac{\text{Jumlah Komite yang ada}}{\text{Total Komite Rekomendasi}}$$

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data berdasarkan sumber dari data sekunder yaitu Laporan Keberlanjutan (*sustainability report*), Laporan Tahunan (*Annual Report*), dan data terpublikasi lainnya. Penelitian menggunakan perusahaan yang terdaftar di IDX ESG Leaders pada periode tahun 2021-2024.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menyajikan gambaran umum atau ringkasan dari suatu data melalui ukuran-ukuran seperti nilai rata-rata, standar deviasi, varians, nilai maksimum dan minimum, total (sum), rentang, kurtosis, serta skewness atau tingkat kemencengan distribusi data (Ghozali, 2017).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Setelah model data panel diperoleh, dilakukan serangkaian uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa hasil analisis tidak mengalami bias. Penelitian ini melibatkan empat jenis uji asumsi klasik, yaitu: uji normalitas untuk mengevaluasi apakah data terdistribusi secara normal, uji multikolinearitas untuk menilai ada tidaknya hubungan linier antara variabel independen, uji heteroskedastisitas untuk menguji kesamaan ragam error (homoskedastisitas), dan uji autokorelasi untuk memastikan tidak terdapat hubungan serial pada residual model. Berikut penjelasan dari masing-masing uji yang digunakan:

3.5.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal (Ghozali, 2017). Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal dan jika sebaliknya data menyebar jauh dari garis diagonal atau grafik histogram maka tidak menunjukkan distribusi normal (Ghozali, 2017).

3.5.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas adalah uji yang bertujuan dalam melihat apakah dalam model regresi adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel independen (Ghozali, 2017). Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Semisal, nilai VIF < 10 atau tolerance > 0,10 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Sedangkan, nilai VIF > 10 atau tolerance < 0,10 maka dinyatakan terjadi multikolinearitas.

3.5.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas tidak merusak properti dari estimasi OLS yaitu tetap tidak biased dan konsisten estimator, tetapi estimator ini tidak lagi memiliki minimum variance dan efisien sehingga tidak lagi BLUE yang akibatnya nilai t statistik dan nilai F menjadi tidak reliable dan berakibat pada kesalahan pengambilan keputusan terhadap signifikansi koefisien regresi (Ghozali, 2017).

Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan metode grafik maupun statistik. Metode grafik dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen ZPRED dengan residualnya SRESID, jika ada pola tertentu maka telah terjadi heteroskedastisitas dan jika pola menyebar secara acak maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2017).

3.5.2.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah uji yang bertujuan dalam mengetahui apakah suatu model regresi linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan periode t-1 (tahun sebelumnya) (Ghozali, 2017). Menurut Santoso (2014), dalam mengidentifikasi masalah autokorelasi, maka digunakan uji Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan, jika:

1. Angka DW dibawah 1.5 artinya terdapat autokorelasi positif
2. Angka DW diantara 1.5 sampai 2.5 artinya tidak terjadi autokorelasi
3. Angka DW diatas 2.5 artinya terdapat autokorelasi negatif.

3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi berganda diterapkan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen dan akan diuji menggunakan SPSS.

Model regresi berganda dalam studi ini dipaparkan melalui persamaan berikut:

$$SDGs = \alpha + \beta_1 FD1 + \beta_2 GC2 + \varepsilon$$

Keterangan:

SDGs = Pengungkapan SDGs

α = Konstanta

β_1 - β_2 = Koefisien regresi

$FD1$ = *Financial distress* perusahaan pada tahun t

$GC2$ = Keberadaan komite tata kelola perusahaan pada tahun t

ε = Error

3.5.4 Uji Hipotesis

3.5.4.1 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara keseluruhan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2017).

- Jika nilai F hitung > nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
- Jika nilai F hitung < nilai F tabel, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Pada taraf signifikan 0,05 berdasarkan p-value maka dihipotesiskan dengan:

H_0 : Jika p-value > 0,05. Maka variabel independen tidak berpengaruh pada variabel dependen bersama-sama.

H_1 : Jika p-value < 0,05. Maka variabel independen berpengaruh pada variabel dependen bersama-sama.

3.5.4.2. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) adalah uji yang menilai kemampuan dari model untuk menjelaskan variasi variabel dependen (Kuncoro, 2007). Nilai koefisien determinasi yaitu antara nilai 0 dengan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Nilai yang kecil mengartikan terkait kemampuan variabel independen menerangkan variasi

variabel terikat sangat terbatas yang sisanya dijelaskan variabel lain dan untuk nilai R^2 menuju satu mengartikan variabel independen nyaris menerangkan semua informasi variabel dependen.

3.5.4.3. Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan (Ghozali, 2017).

- Jika nilai t hitung $>$ nilai t tabel, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Jika nilai t hitung $<$ nilai t tabel, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pada taraf signifikan 0,05 berdasarkan p-value maka dihipotesiskan dengan:

H_0 : Jika p-value $>$ 0,05. Maka variabel independen tidak berpengaruh pada variabel dependen.

H_1 : Jika p-value $<$ 0,05. Maka variabel independen berpengaruh pada variabel dependen.

3.5.4.4 Uji Beda (*Independent t-test*)

Uji beda dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara sektor manufaktur dan jasa dalam pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pengujian akan dilakukan dengan *independent t-test* dengan asumsi data terdistribusi normal dan berasal dari dua kelompok yang tidak saling bergantung (independen). Menurut Ghozali (2018) *independent t-test* digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua populasi atau dua kelompok sampel yang berbeda. Penggunaan uji ini umum dalam penelitian akuntansi untuk membandingkan, misalnya, kinerja keuangan perusahaan berdasarkan klasifikasi tertentu seperti ukuran perusahaan, jenis industri, atau kepemilikan saham.

Pengujian hipotesis dengan alat uji ini dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, antara lain Achan dan Chariri (2014) untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan antara bank syariah murni dan bank syariah campuran. Penelitian lain

oleh Hadi et al. (2019) juga menggunakan Independent t-test untuk membandingkan penggunaan informasi akuntansi antara pelaku usaha kecil dan menengah yang pernah mengikuti pelatihan akuntansi dengan yang tidak. Dalam konteks penelitian ini, pengujian dilakukan menggunakan software SPSS dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil pengujian kemudian ditafsirkan berdasarkan nilai *p-value* untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok dalam variabel yang diuji. Pengujian hipotesis diambil berdasarkan probabilitas (Pratisto, 2004) dengan cara:

H0: Jika probabilitas $> 0,05$ maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sektor manufaktur dan jasa dalam pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

H1: Jika probabilitas < 0.05 maka terdapat perbedaan yang signifikan antara sektor manufaktur dan jasa dalam pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada perusahaan sampel, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat *Financial Distress* yang diukur melalui *Altman Z''-Score* terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perluasan Pengungkapan SDGs. Karakteristik alat ukur ini menunjukkan bahwa semakin sehat kondisi keuangan suatu perusahaan (skor Altman meningkat), maka manajemen akan semakin luas dalam mengungkapkan informasi SDGs. Fenomena ini memperkuat *Slack Resources Theory*, di mana stabilitas finansial memberikan kelonggaran bagi perusahaan untuk mendanai aktivitas sukarela terkait isu sosial dan lingkungan demi menjaga legitimasi publik.
2. Keberadaan komite tata kelola ditemukan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pengungkapan SDGs. Penambahan jumlah anggota atau formalitas pembentukan komite tata kelola ini cenderung baru sebatas pemenuhan regulasi (*formalistic compliance/tokenism*) agar terlihat patuh di mata otoritas pasar modal (OJK). Berdasarkan sudut pandang *Agency Theory*, fungsi komite dewan pada objek penelitian masih sangat fokus pada pengawasan laporan keuangan konvensional demi kepentingan investor (*shareholders*), sehingga pengawasan terhadap isu pembangunan berkelanjutan belum menjadi prioritas utama.
3. Sektor industri terbukti memberikan perbedaan yang nyata terhadap tingkat Pengungkapan SDGs. Menariknya, perusahaan di sektor jasa mencatatkan nilai rata-rata (*Mean*) pengungkapan yang lebih tinggi (0,6693) dibandingkan sektor manufaktur (0,6144). Melalui pendekatan *Signaling Theory*, sektor jasa yang sangat bergantung pada aset tidak berwujud (*intangible assets*)

seperti reputasi merek memanfaatkan pelaporan SDGs sebagai sinyal strategis untuk menarik konsumen modern dan investor berbasis ESG (*Environmental, Social, and Governance*).

5.2 Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang dapat memengaruhi generalisasi hasil, antara lain:

1. Ruang lingkup variabel independen yang terbatas: penelitian ini baru memfokuskan analisis pada aspek internal berupa tingkat kesehatan keuangan (*altman z''-score*) dan komponen tata kelola formal (Komite Dewan), sehingga belum mampu menangkap faktor eksternal lain secara makro.
2. Karakteristik pengungkapan yang bersifat sukarela: penilaian indeks pengungkapan sdgs dalam laporan tahunan masih mengandung unsur subjektivitas peneliti karena belum adanya standarisasi baku yang kaku dari otoritas domestik mengenai item mana saja yang wajib dilaporkan secara spesifik oleh tiap sektor.
3. Rentang waktu pengamatan: periode pengamatan yang digunakan relatif terbatas, sehingga belum mampu menggambarkan tren pergeseran komitmen SDGs korporasi dalam jangka panjang yang lebih dinamis.
4. Keterbatasan terkait pengukuran variabel komite tata kelola (X2): penelitian ini mengukur komite tata kelola berdasarkan keberadaan komite dewan secara agregat. Namun, instrumen ini memiliki keterbatasan karena tidak mampu menangkap efektivitas substantif dari komite tersebut. Data menunjukkan adanya homogenitas data yang sangat tinggi (Standar Deviasi 0,037), di mana mayoritas emiten di luar sektor keuangan secara seragam hanya membentuk 2 komite demi kepatuhan formal terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akibatnya, variabel ini mengalami fenomena tokenism dan kehilangan daya penjelas (*explanatory power*) dalam memengaruhi pengungkapan SDGs yang fluktuatif, sehingga penelitian ini belum mampu memotret aktivitas rapat, kompetensi spesifik ESG dari anggota komite, serta intervensi riil mereka dalam kebijakan keberlanjutan.

5.3 Saran

Berpijak dari kesimpulan dan keterbatasan di atas, maka saran yang dapat direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya serta pihak terkait adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penelitian Selanjutnya:
 - a. Diharapkan dapat memperluas model penelitian dengan menambahkan variabel independen eksternal lainnya, seperti tekanan media, kepemilikan institusional internasional, atau tingkat kompetisi industri yang berpotensi memengaruhi kebijakan pengungkapan non-keuangan.
 - b. Disarankan untuk memperpanjang rentang tahun pengamatan (*time frame*) agar dapat menangkap konsistensi tren pengungkapan SDGs dari tahun ke tahun.
 - c. Disarankan dapat menggunakan proxy lain untuk mengukur komite tata kelola seperti: frekuensi rapat komite, kompetensi/sertifikasi anggota & karakteristik piagam komite (*committee charter*).
2. Bagi Praktisi Korporasi:
 - a. Manajemen perusahaan, khususnya di sektor manufaktur, diharapkan tidak lagi memandang pelaporan SDGs sebagai beban biaya (*cost-center*), melainkan sebagai investasi strategis jangka panjang untuk membangun legitimasi dan mengamankan kepercayaan pasar global.
 - b. Perusahaan perlu memperkuat peran substantif Komite Dewan dengan menyusun piagam kerja khusus (*committee charter*) yang secara eksplisit mewajibkan pengawasan terhadap indikator keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan (ESG).
3. Bagi Regulator (OJK dan Bursa Efek):
 - a. Diharapkan dapat terus menyempurnakan panduan teknis pelaporan keberlanjutan yang terintegrasi dengan 17 poin SDGs, sehingga terdapat standarisasi penilaian yang lebih objektif dan setara antar sektor industri di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. W., & Amiruddin, H. (2020). Efek Green Accounting Terhadap Material Flow Cost Accounting dalam Meningkatkan Keberlangsungan Perusahaan. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4, 166–186.
- Ajija, S. R., Sari, D. W., Setianto, R. H., & Primanthi, M. R. (2011). Cara Cerdas Menguasai Eviews. In *Salemba Empat*. Jakarta.
- Alaidrus, F. (2019). Kebocoran Minyak Pertamina Disebut Sebagai Kejahatan Lingkungan. Retrieved September 20, 2023, from Tirto.id website: <https://tirto.id/kebocoran-minyak-pertamina-disebut-sebagai-kejahatan-lingkungan-efaN>
- Angela, P., & Handoyo, S. (2021). The Determinants of Environmental Disclosure Quality: Empirical Evidence from Indonesia. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 4, 41.
- Astari, T. A., Laurens, S., Wicaksono, A., & Sujarminto, A. (2023). Green Accounting and Disclosure of Sustainability Report on Firm Values in Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 426, 02024.
- Bae Choi, B., Lee, D., & Psaros, J. (2013). An analysis of Australian company carbon emission disclosures. *Pacific Accounting Review*, 25, 58–79.
- BBC. (2023). Riset sebut polusi udara PLTU Suralaya Banten ‘menyebabkan 1.470 nyawa melayang.’ Retrieved September 20, 2023, from bbc.com website: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cv213m30dxko>
- Benameur, K. B., Mostafa, M. M., Hassanein, A., Shariff, M. Z., & Al-Shattarat, W. (2023). Sustainability reporting scholarly research: a bibliometric review and a future research agenda. *Management Review Quarterly*. <https://doi.org/10.1007/s11301-023-00319-7>
- Brigham, & Houston. (2010). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Buku 1* (11th ed.). Jakarta: Salemba Empat.

- Chang, W. F., Amran, A., Iranmanesh, M., & Foroughi, B. (2019). Drivers of sustainability reporting quality: financial institution perspective. *International Journal of Ethics and Systems*, 35, 632–650.
- CNBC Indonesia. (2023). Suhu di India-Myanmar Tembus 51,2 C, Apa Itu Gelombang Panas? Retrieved September 20, 2023, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230425180340-4-432217/suhu-di-india-myanmar-tembus-512-c-apa-itu-gelombang-panas>
- Cohen, N., & Robbins, P. (2011). *Green Business: An A-to-Z Guide*. United States: SAGE Publications, Inc.
- Dang, C., (Frank) Li, Z., & Yang, C. (2018). Measuring firm size in empirical corporate finance. *Journal of Banking & Finance*, 86, 159–176.
- Diono, P. 2017. (2017). Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance , Profitabilitas , Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Sustainability Report. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6, 1–10.
- Dizar, S., Alifia, S., & Alvionita, F. (2019). The Effect Of Audit Committee, Gender Commissioners And Directors, Role Duality, And Firm Size Againts Extension Of Sustainability Report Disclosure. *Indonesian Management and Accounting Research*, 17, 71–87.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business*. Oxford: Capstone Publishing Limited.
- Fadila, R., & Setiawan, D. (2022). Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan terhadap Pengungkapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 19(1), 1–15.
- Fitri, A., Sari, R. N., & Wibowo, A. (2021). Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Sustainability Report pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(6), 1–15.
- Gakkum KLHK. (2024, February 12). KLHK Ajukan Perlawanan Hukum Atas Putusan Pailit PT Ricky Kurniawan Kertapersada Atas Permohonannya Sendiri Berkaitan Eksekusi Putusan MA Terhadap Perkara Gugatan Karhutla. Retrieved March 20, 2024, from <https://gakkum.menlhk.go.id/infopublik/detail/737>

Ghozali, I. (2017). *Ekonometrika, Teori, Konsep dan Aplikasi dengan IBM SPSS*

24. Semarang: Badan Penerbit Undip.

Ghozali, I., & Chairi, A. (2007). *Teori Akuntansi* (3rd ed.). Semarang: Badan Penerbit Undip.

Global Carbon Atlas. (2022). Territorial (MtCO₂). Retrieved September 20, 2023, from <https://globalcarbonatlas.org/emissions/carbon-emissions/>

Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2016). *Akuntansi Manajerial terjemahan Deny Arnos*. Jakarta: Salemba Empat.

Hapsoro, D., & Suryanto, T. (2020). *Agency Theory and Sustainability Reporting: Evidence from Indonesia*. *Journal of Accounting and Investment*, 21(2), 202–218.

Hartono, J. (2008). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPFE. Iacobucci, D., Schneider, M. J., Popovich, D. L., & Bakamitsos, G. A. (2016).

Mean centering helps alleviate “micro” but not “macro” multicollinearity.

Behavior Research Methods, 48, 1308–1317.

Ifada, L. M., & Saleh, N. M. (2022). Environmental performance and environmental disclosure relationship: the moderating effects of environmental cost disclosure in emerging Asian countries. *Management of Environmental Quality: An International Journal*, 33, 1553–1571.

Ikhsan, A. (2008). *Akuntansi lingkungan & pengungkapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Imron, A., & Hamidah. (2022). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Struktur Modal Terhadap Pengungkapan Sustainability Report. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22, 1–13.

IQAir. (2022). Apakah polusi udara menyebabkan perubahan iklim? Retrieved September 20, 2023, from <https://www.iqair.com/id/newsroom/does-air-pollution-cause-climate-change>

- Harymawan, I., Putra, F. K. G., & Fianto, B. A. (2021). *Financially distressed firms: Environmental, social, and governance reporting in Indonesia*. *Sustainability*, 13(18), 10156.
<https://doi.org/10.3390/su131810156>
- Itsnaini, F. M., & Alexander, H. B. (2024, February 20). Kerugian Kerusakan Lingkungan Rp 271 Triliun dari Kasus Korupsi Timah. Retrieved March 20, 2024, from <https://lestari.kompas.com/read/2024/02/20/190000086/kerugian-kerusakan-lingkungan-rp-271-triliun-dari-kasus-korupsi-timah?page=all>
- Justita Dura, & Riyanto Suharsono. (2022). Application Green Accounting To Sustainable Development Improve Financial Performance Study In Green Industry. *Jurnal Akuntansi*, 26, 192–212.
- Kuncoro, M. (2007). *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18, 103–112.
- Kuzey, C., & Uyar, A. (2017). Determinants of sustainability reporting and its impact on firm value: Evidence from the emerging market of Turkey. *Journal of Cleaner Production*, 143, 27–39.
- Loen, M. (2018). Penerapan Green Accounting dan Material Flow Cost Accounting (MFCA) Terhadap Sustainable Development. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 5.
<https://doi.org/10.35137/jabk.v5i1.182>
- Lu, L. W., & Taylor, M. E. (2018). A study of the relationships among environmental performance, environmental disclosure, and financial performance. *Asian Review of Accounting*, 26, 107–130.
- Lucia, L., & Panggabean, R. R. (2018). the Effect of Firm'S Characteristic and Corporate Governance To Sustainability Report Disclosure. *Social Economics and Ecology International Journal (SEEIJ)*, 2, 18–28.
- Magablih, A. M. (2017). The Impact of Green Accounting for Reducing the Environmental Cost in Production Companies. *Journal of Modern Accounting and Auditing*, 13, 249–265.

- Marota, R. (2017). Green Concepts and Matterial Flow Cost Accounting Application for Company Sustainability. *Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship*, 3, 43–51.
- Mustofa, U. A., Edy, R. N. A. P., Kurniawan, M., & Kholid, M. F. N. (2020). Green Accounting Terhadap CSR pada Bus di Indonesia dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6, 508.
- Myristika, N., & Junarsin, E. (2023). Corporate governance, financial performance, and sustainability disclosure: Evidence from Indonesia. *Journal of Management and Governance*, 27(3), 845–870. <https://doi.org/10.1007/s10961-022-09951-w>
- Nasir, A., Ilham, E., & Utara, V. I. (2014). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance terhadap Pengungkapan Sustainability Report pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar. *Jurnal Ekonomi*, 22, 1–18.
- Nugroho Wicaksono, A. P. (2023). *Eksplorasi Sustainable Development Goals (SDGs) Disclosure di Indonesia*. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(1). <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i1.26448>
- Nur, T., & Panggabean, R. R. (2023). The Impact of Environmental Performance on Environmental Disclosure, moderated by Company Characteristics. *E3S Web of Conferences*, 426. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202342601092>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik*. Diakses pada 9 Juni 2025 dari <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-keuangan-berkelanjutan.aspx>

- Pedron, A. P. B., Macagnan, C. B., Simon, D. S., & Vancin, D. F. (2021). Environmental disclosure effects on returns and market value. *Environment, Development and Sustainability*, 23, 4614–4633.
- Pramanik, A., Shil, N., & Das, B. (2008). Environmental accounting and reporting With special reference to India. *The Cost and Management*, 3, 16–28.
- Prastiwi, A., & Puspitaningrum, A. (2012). Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Internet Financial and Sustainability Reporting (IFSR) (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1.
- Pratiwi, D. A., & Hadi, R. (2020). *Sustainability Reporting pada Perusahaan Jasa: Fokus pada Pilar Sosial dan Ekonomi SDGs*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 422–438.
- Purnama, D. P. (2021). *The Effect of Financial Performance and Corporate Governance on Sustainability Report Disclosure with Company Size as a Moderation*. 1, 138–162.
- Purwanti, M., & Lestari, Y. D. (2022). Praktik Pengungkapan Sustainability Report dan Environmental Incidents: Studi pada Sustainability Report Perusahaan BUMN PT. Pertamina (Persero) Tahun 2017-2018. *Portofolio: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi*, 18, 84–100.
- Razak, L. A., & Azizah, N. (2023). Determinan Green Accounting terhadap Sustainable Development pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI. *Al-Buhuts*, 19, 587–601.
- Riduwan, A., & Andajani, A. (2022). Pemenuhan Tanggungjawab Ekonomik- Sosio-Ekologi: Benarkah Memicu Keberlanjutan Kinerja Keuangan? *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 6, 156–179.
- Riyanto, B. (2001). *Dasar-dasar pembelanjaan perusahaan*. Yogyakarta: BPF. Ruhana, A., Hidayah, N., & Buana, U. M. (2020). The Effect of Liquidity , Firm Size , and Corporate Governance Toward Sustainability Report Disclosures. *Atlantis Press*, 120, 279–284.
- Santoso, S. (2014). Statistik Parametrik: Konsep dan Aplikasi dengan SPSS. In *PT Elex Media Komputindo*. Jakarta.
- Saputro, M. G. D., & Nuswantara, D. A. (2022). the Quality of

- Environmental Performance Assessed From Green. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 6, 11–23.
- Setyawan, W., Tanzil, F. F., & Rosdini, D. (2022). Pengaruh karakteristik tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan dukungan SDGs dalam laporan keberlanjutan. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 9(2), 101–112.
- Supranto, J. (2015). *Statistik Teori dan Aplikasi* (8th ed.). Jakarta: Erlangga. Ulupui.
- Susanto, Y., & Firmansyah, D. (2020). Analisis Perbedaan Pengungkapan Keberlanjutan antara Sektor Manufaktur dan Jasa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(3), 89–101.
- I. G. K. A., Murdayanti, Y., Marini, A. C., Purwohedi, U., Mardia, M., & Yanto, H. (2020). Green accounting, material flow cost accounting and environmental performance. *Accounting*, 743–752.
- Widhiastuti, N. L. P., Suputra, I. D. G. D., & Budiasih, I. G. A. N. (2017). Pengaruh Kinerja Lingkungan Pada Kinerja Keuangan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Intervening. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 6.2, 2, 819–846.
- Widyawati & Hardiningsih P. (2022). Apakah Kinerja Lingkungan Mempengaruhi Pengungkapan Lingkungan? *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23.
- Wulaningrum, R., & Kusrihandayani, D. (2020). Pengaruh Pengungkapan Lingkungan, Biaya Lingkungan Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan. *Prosiding 4th Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 97–103.
- Yazid, M. (2011). Ada 11 BUMN Berpredikat Perusahaan Hitam. Retrieved September 20, 2023, from Kompas.com website:
<https://money.kompas.com/read/2011/12/04/16030778/Ada.11.BUMN.Berpredikat.Perusahaan.Hitam>
- Zulhaimi, H. (2015). Pengaruh Penerapan Green Accounting terhadap Kinerja Perusahaan (Studi pada Perusahaan Peraih Penghargaan Industri Hijau yang Listing di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3, 603–616.